

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia bertambah, oleh karena itu perekonomian secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ada beberapa jenis data yang digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada tahun tertentu dan perubahan dari satu periode ke periode lainnya, antara lain pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) (Sukirno, 2010).

A1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi (Djojohadikusumo, 1993).

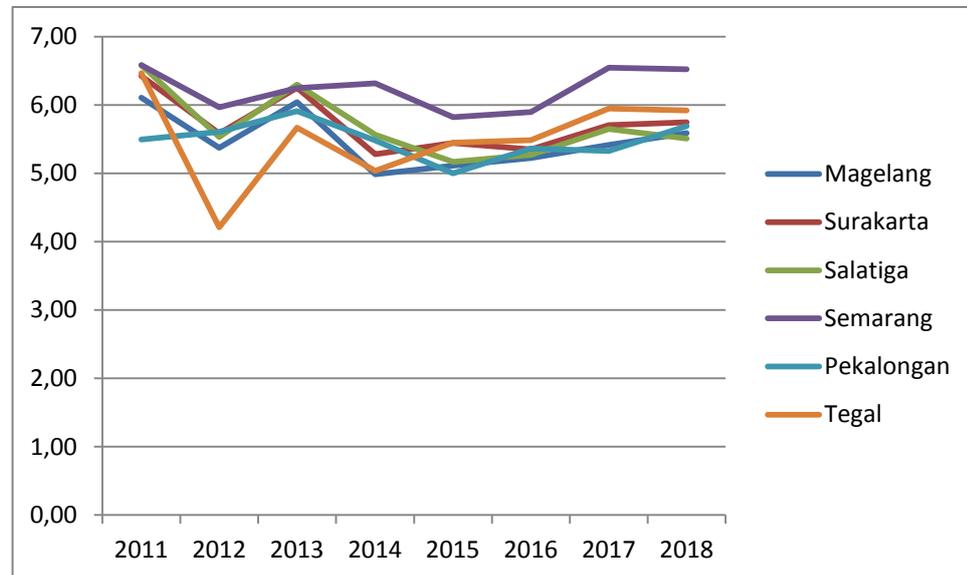
Menurut Schumpeter menjeaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan

cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Boediono, 1999).

PDRB adalah nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah PDRB merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara di ukur oleh dua indikator utama yaitu PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional (Saberan, 2002).

Dibawah ini akan dijelaskan laju pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB kota di Jawa Tengah tahun 2010 sampai 2018 dalam bentuk persen yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah 2018.

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kota di Jawa Tengah, 2010 – 2018.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 (diolah)

Pada Grafik1.1 laju pertumbuhan PDRB Kota di Jawa Tengah tahun 2016 rata-rata mencapai 5,56 persen, rata-rata pertumbuhan ekonomi di kota Jawa Tengah melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,73 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,72 persen didorong oleh produksi gas di Blora yang memasuki masa puncak produksi sejak dimulainya eksplorasi migas pada akhir 2015. Adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan usaha unggulan mampu tumbuh 4,09 persen pada tahun 2016, sedangkan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 2,13 persen, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 5,60 persen.

A2. Pajak dan Retribusi

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat ini sebagai kewajiban masyarakat/wajib pajak, serta Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tingkat daerah memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif. Asumsinya pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kuncoro, 2004).

Tabel 1.1
Realisasi Total Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak dan Retribusi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014– 2016.

Tahun	Pajak	Retribusi	Total Pendapatan
2014	7.097.094.340	78.031.283	7.175.125.623
2015	10.266.079.853	84.022.367	10.350.102.220
2016	12.054.424.421	96.570.884	12.150.995.305

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah, 2016

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pendapatan Provinsi Jawa Tengah disektor baik dari pajak maupun retribusi memiliki jumlah yang besar, dilihat pada setiap tahunnya jumlah pendapatan daerah yang berasal dari pajak selalu

melebihi pendapatan yang berasal dari retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah. Karena setiap masyarakat dikenakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat setiap tahunnya, sedangkan retribusi hanya dibayar oleh masyarakat yang menggunakan jasa atau pemberian izin dari pemerintah.

Dihat dari Tabel 1.1 total pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi Provinsi Jawa Tengah paling besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 12.150.995.305 dan terkecil yaitu tahun 2014 dengan total pendapatan sebesar Rp 7.175.125.623, maka dari 3 tahun terakhir Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan yaitu sebesar Rp 4.975.869.682 dari tahun 2014 sampai 2016.

(Olatunji, 2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Liliana, 2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Darwanto dan (Darwanto & Yustikasari, 2007) serta (Tuasikal, 2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, (Ogujioba & Abraham, 2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

A3.Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat (Darwanto & Yustikasari, 2007).

A4.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. Pada dasarnya Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya

pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis (Halim, 2014).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Pendapatan DAU dan DAK Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2016

Tahun	DAU	Pertumbuhan (%)	DAK	Pertumbuhan (%)
2014	1.803.931.189	7,96	79.165.240	-4,07
2015	1.803.931.189	0	57.972.640	-26,77
2016	1.859.907.223	3,1	5.373.908.330	9168,73

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah, 2016 (diolah)

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa pertumbuhan DAU dan DAK mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pertumbuhan DAU mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2015 dari sebesar 7,96% menjadi 0% karena DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah jumlahnya sama, yang mengakibatkan pertumbuhan DAU pada tahun 2015 tidak mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2016 pertumbuhan DAU di Jawa Tengah naik sebesar 3,10%.

Pertumbuhan DAK sama juga seperti pertumbuhan DAU yang mengalami fluktuasi, bahkan pertumbuhan DAK mengalami pertumbuhan yang negatif karena DAK dari pemerintah pusat mengalami penurunan untuk kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana seperti jalan, irigasi, dan jembatan yang digunakan untuk pendistribusian industri masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Tahun penurunan pertumbuhan DAK sama seperti tahun penurunan pertumbuhan DAU yaitu pada tahun 2014 sampai 2015, tetapi DAK pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan menyebabkan

pertumbuhan DAK juga ikut naik signifikan hingga sebesar 9168,73%, karena dari pemerintah pusat akan menganggarkan APBN 2016 sebagai dana tambahan sebesar 100 miliar kepada setiap kota/kabupaten, yang akan digunakan untuk penguatan desentralisasi fiskal dalam pembangunan infrastruktur di daerah kota/kabupaten tersebut.

A5.Dana Bagi Hasil (DBH)

Pemerintah Daerah juga akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mengalami fluktuatif akibat dari fluktuasi pendapatan daerah, dan melakukan penelitian kembali dengan melakukan penambahan variabel untuk mengetahui lebih jauh mengenai **”Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2016”**

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan pesat dalam tiga tahun terakhir atau sejak 2014. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini lebih cepat dibanding Nasional yang tumbuh stabil pada kisaran 5 persen. Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,74 persen terhadap perekonomian nasional. Jateng berada pada posisi keempat penyumbang perekonomian terbesar setelah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Saat ini ekonomi Jawa Tengah terdorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur yang tumbuh sebesar 7,35 persen, ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,54 persen (Sudrajat, 2017).

Berdasarkan latar belakang dan hal-hal yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- B1. Sebaerpa besar pengaruh pajak dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ?
- B2. Sebaerpa besar pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ?
- B3. Sebaerpa besar pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ?
- B4. Sebaerpa besar pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ?
- B5. Bagaimanakah pengaruh kelima variabel tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- C1. Untuk menganalisis pengaruh pajak, retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
- C2. Untuk menganalisis pengaruh DAU, DBH terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
- C3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

D1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus juga tambahan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi sektor publik yang bilamana mungkin tidak dibahas secara lengkap dalam suatu perkuliahan.

D2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data panel yaitu data periode waktu 2014-2016 (*time series*) yang terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia (*cross section*). Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa data publikasi dan tabel dinamis yang meliputi variabel pertumbuhan ekonomi. Selain diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data juga diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang meliputi variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Data yang diperoleh yaitu data berdasarkan Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.

E2. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* atau data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan pada satu objek dengan beberapa periode waktu, sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada beberapa objek dalam satu waktu. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi dari jurnal Fauznyi dengan judul "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011” adalah sebagai berikut :

$$EG_{it} = \beta_0 + \beta_1 Tax_{it} + \beta_2 Ret_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

EG = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Tax = Pajak (Rupiah)

Ret = Retribusi (Rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (Rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (Rupiah)

β_0 = konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = koefisien regresi variabel independen

i = observasi ke i

t = tahun ke t

e = Error term

E3. Estimasi model ekonometrika data panel di atas meliputi langkah langkah sebagai berikut :

Mengestimasi model data panel PLS (*Partial Least Square*), FEM (*Fixed Effect Model*), REM (*Random Effect Model*).

E3.1. Uji pemilihan model data panel

1) *Uji Chow*

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara model PLS dengan FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

H₀ : model menggunakan *Common Effec* (PLS)

H_a : model menggunakan *Fixed Effect* (FEM)

2) *Uji Hausman*

Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara REM dengan FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

H₀ : model menggunakan *Random Effect* (REM)

H_a : model menggunakan *Fixed Effect* (FEM)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian

yang dapat membantu penyusunan skripsi. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis serta estimasi mode yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan dari hasil penelitian serta mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN